PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Merapi | Hari: Sabtu | Tanggal: 19 Juni 2021 | Halaman: 2

TERAS

Tarik Rem Darurat

PENAMBAHAN kasus harian Covid-19 di DIY pecah rekor. Dalam dua hari terakhir terdapat 500-an kasus positif, dan menjadikannya sebagai kasus tertinggi selama pandemi yang sudah berjalan 1,5 tahun di provinsi tersebut. DIY harus menarik rem darurat dan mengencangkan kembali aturan pembatasan aktivitas masyarakat jika tidak ingin bertambah gawat.

Penambahan kasus ini didominasi mobilitas pascalebaran. Meski mudik Lebaran dilarang, namun realitanya masih ada sebagian warga yang nekat pulang kampung. Mobilitas besar juga terjadi setelah tidak ada penyakatan di perbatasan antarprovinsi, serta dibukanya objek wisata yang mendorong warga memilih plesiran sebagai bentuk kekecewaan karena mudik dilarang untuk kedua kalinya.

Tingginya kasus penularan Covid-19 di DIY ini dikhawatirkan juga membawa serta varian baru corona, yakni Delta, yang sudah menyebar di Kudus Jawa Tengah. Varian ini dapat menyerang sistem imun manusia lebih kuat, meski yang terpapar sudah mendapatkan vaksin pencegahan. Oleh karenanya, DIY mulai mengantisipasi penambahan fasilitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 karena tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR) sudah di atas 50 persen.

Pemda DIY juga memilih menunda pembelajaran tatap muka yang berlangsung mulai tahun ajaran baru bulan depan. Penundaan untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan ini demi mencegah penularan lebih luas. Sekolah tatap muka terbatas juga akan ditiadakan lebih dahulu meski sekolah sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Upaya vaksinasi massal untuk tenaga pendidikan pun terus dipercepat.

Tingginya penularan yang saat ini didominasi di lingkungan keluarga ini sangat miris mengingat saat ini pemerintah menerapkan pemberlakuan pengetatan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. PPKM mikro ini bahkan diperpanjang hingga kesekian kalinya namun efektivitasnya dipertanyakan. Wajar jika banyak pihak yang menganjurkan lockdown agar mobilitas masyrakat benar-benar dapat dikendalikan. Hanya saja, aturan ini akan sukses jika dibarengi dengan tingginya kepatuhan warga menjalankan protokol kesehatan 5M. Toh faktanya makin banyak warga yang jenuh dengan situasi saat ini, meski di sisi lain kasus semakin tinggi. ***-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan 2. BPBD 3. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 14 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005